

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Permasalahan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Jawa Tengah (Studi pada Samsat Kota Semarang), dapat disimpulkan bahwa permasalahan tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor merupakan tantangan yang masih dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam upaya mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Melalui analisis berdasarkan teori manajemen strategis Hadari Nawawi, penelitian ini menunjukkan bahwa penanganan tunggakan dilakukan melalui tahapan perencanaan strategis, implementasi strategi, serta evaluasi dan pengendalian strategis. Adapun kesimpulan penelitian ini diantaranya ialah:

1. Permasalahan tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Jawa Tengah, khususnya pada Samsat Kota Semarang, ditunjukkan oleh meningkatnya jumlah wajib pajak yang menunggak serta besarnya nilai tunggakan setiap tahunnya. Lonjakan jumlah penunggak pada tahun 2024 menunjukkan bahwa kepatuhan masyarakat masih menjadi persoalan utama. Selain dipengaruhi oleh kondisi ekonomi masyarakat, permasalahan tersebut juga disebabkan oleh rendahnya kesadaran membayar pajak tepat waktu, belum optimalnya proses balik nama kendaraan bermotor, serta masih ditemukannya data wajib pajak yang

tidak sesuai dengan kondisi di lapangan sehingga menyulitkan proses penagihan.

2. Strategi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Badan Pendapatan Daerah dalam mengatasi tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor dilaksanakan melalui beberapa program strategis yang meliputi program pemutihan pajak kendaraan bermotor, Operasi Gabungan bersama instansi terkait, sosialisasi digital melalui media sosial, serta program penagihan langsung (door to door). Keempat strategi tersebut merupakan implementasi hasil perencanaan strategis berdasarkan analisis kondisi internal dan eksternal organisasi. Pelaksanaan strategi tersebut didukung oleh pendekatan pelayanan yang lebih mudah, peningkatan koordinasi antarinstansi, pemanfaatan teknologi informasi, serta perluasan akses pembayaran melalui Samsat Keliling dan aplikasi digital sehingga mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
3. Faktor yang memengaruhi implementasi strategi terdiri atas faktor kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman sebagaimana dianalisis melalui pendekatan SWOT. Faktor kekuatan meliputi sinergi antarinstansi, kompetensi sumber daya manusia, sistem informasi yang terintegrasi, serta dukungan kebijakan pemerintah daerah berupa program pemutihan pajak. Faktor kelemahan meliputi keterbatasan validitas data wajib pajak, rendahnya tingkat balik nama kendaraan, serta masih terbatasnya literasi administrasi masyarakat. Faktor peluang

berasal dari perkembangan teknologi digital, meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan elektronik, serta adanya dukungan kebijakan pemerintah dalam meningkatkan pelayanan publik. Sementara itu, faktor ancaman berasal dari kondisi ekonomi masyarakat yang memengaruhi kemampuan membayar pajak, tingginya mobilitas wajib pajak, serta masih adanya persepsi negatif masyarakat terhadap pelayanan birokrasi. Berdasarkan hasil analisis tersebut, strategi yang diterapkan dinilai telah mampu mendukung upaya penanganan tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor, meskipun masih diperlukan penyempurnaan dalam validasi data, penguatan edukasi perpajakan, serta peningkatan koordinasi antarinstansi agar efektivitas strategi dapat terus ditingkatkan.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bapenda), maupun peneliti selanjutnya dalam upaya meningkatkan efektivitas penanganan tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor.

- 1. Bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Bapenda,** disarankan untuk terus meningkatkan kualitas basis data wajib pajak melalui pemutakhiran data kepemilikan kendaraan secara berkala serta memperkuat integrasi data dengan instansi terkait. Langkah tersebut

penting untuk mengurangi permasalahan alamat yang tidak sesuai dan kendaraan yang belum dilakukan proses balik nama sehingga kegiatan penagihan dapat berjalan lebih efektif.

2. **Bagi Samsat Kota Semarang**, disarankan agar terus mengembangkan inovasi pelayanan, khususnya melalui optimalisasi sosialisasi digital, perluasan layanan Samsat Keliling, serta peningkatan pemanfaatan aplikasi pembayaran elektronik. Selain itu, edukasi mengenai pentingnya pembayaran pajak tepat waktu dan kewajiban balik nama kendaraan perlu dilakukan secara berkelanjutan agar tingkat kesadaran masyarakat semakin meningkat.
3. **Bagi masyarakat**, diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban membayar Pajak Kendaraan Bermotor tepat waktu serta segera melakukan proses balik nama kendaraan apabila terjadi perpindahan kepemilikan. Kepatuhan tersebut tidak hanya menghindarkan masyarakat dari sanksi administrasi, tetapi juga mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang akan dimanfaatkan untuk pembangunan dan pelayanan publik.
4. **Bagi peneliti selanjutnya**, disarankan untuk mengembangkan penelitian dengan cakupan wilayah yang lebih luas atau menggunakan pendekatan metode campuran (mixed methods) sehingga dapat memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor. Penelitian selanjutnya juga dapat mengkaji efektivitas masing-masing program

strategis secara lebih mendalam melalui analisis kinerja atau evaluasi kebijakan publik.